



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU**

- ☎ Telp. 0567 -21485 Fax. 0567- 21485
- ✉ kesbangpol21kh@gmail.com
- 📍 Jalan Antasari No. 02 Putussibau 78716

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas hulu disusun bertujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai kebijakan, program serta kegiatan yang dilaksanakan selama tahun berjalan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sehingga apa yang dikerjakan akan tepat sasaran dan akan menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih, khususnya kepada Tim Penyusun yang telah menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Putussibau, Juli 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU



MUHTARUDIN, S. Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19710219 199101 2 002

DAFTAR ISI

HAL

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB. I : Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
 BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	19
3.1. Matrik Rencana Kerja Perangkat Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan Beserta Pendanaan.	20
 BAB IV : Penutup	26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi dan era desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan tidak terlepas dengan Peraturan dan Perundangan, untuk itu kita harus Kembali menata system, prosedur dan proses-proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik dan Pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Alur Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan Pembangunan Tahunan Daerah pada umumnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam system perencanaan daerah karena Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja berhubungan langsung dengan pelayanan kepada Masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Guna menunjang tujuan utama Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya maka perlu kiranya di tindaklanjuti dengan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjabarkan Perencanaan dan Penganggaran Tahunan serta merupakan Langkah antisipatif dan sinergitas program antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi wilayah dan Pemerintahan yang tentram, tertib dan teratur dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai cerminan realisasi tujuan dan sasaran sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Sejalan dengan tuntutan tersebut diatas, perlu segera diupayakan beberapa Langkah dan Tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikan, salah satu Langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memiliki elemen dasar transparasi, partisipasi dan akuntabilitas.

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

Dalam rangka mendorong terwujudnya good government kondisi idealnya semua kegiatan organisasi pemerintahan seharusnya terukur, dapat memberikan arah yang jelas dan dapat dievaluasi, sehingga fungsi dan peran Pemerintah sebagai akselerator Pembangunan menjadi nyata dan dapat mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam Menyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 35 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 bermaksud untuk memberikan arah bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mengalami perubahan dan/atau tidak mengalami perubahan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2024 adalah memberikan arah bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang mengalami perubahan dan/atau tidak mengalami perubahan sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah adalah memberikan Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan sinkronisasi antara perubahan RKPD dengan perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Secara Substansia : Sebagai arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Secara Normatif : Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Secara Operasional : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan pemerintahan.
4. Secara Faktual : Menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I

Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II

Bab ini memuat revidi kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Realisasi capaian target kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Triwulan II Tahun 2024.

BAB III

Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat kegiatan lanjutan sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV

Penutup

Bab ini berisi hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan kesimpulan dari Perubahan RENJA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II

**EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu diukur berdasarkan target yang dibuat pada perjanjian kinerja tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan target indikator kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

MATRIK HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Restra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Restra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun 2024 yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trwulan II TAHUN 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV						
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/5x100%	15								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Belanja Langsung		0%	43.925.289.344		24.226.397.830,00		43.925.289.344		558.837.275	3%	1.452.355.902				1.452.355.902		25.678.753.732		58,46	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Proram Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/kota	Persentase administrasi perkantoran		2.841.838.894			0%	2.841.838.894	0%	510.221.775	43%	1.228.128.802	0%	0%	0%	1.228.128.802	0%	1.228.128.802	-	43,22	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah			27.368.500		51.168.500,00		27.368.500		10.293.500	46%	12.493.500				12.493.500		63.662.000		232,61	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di SKPD		9.893.500		17.993.500,00	5	9.893.500	0%	9.893.500	100%	9.893.500	0%	0%	0%	9.893.500	0%	27.887.000	-	281,87	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksanannya Koordinasi dan Pelaksanaan RKA-SKPD		2.349.000		2.349.000,00	1	2.349.000	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	-	0%	2.349.000	-	100,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1		0%		0%		0%	0%				-			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		2.271.000		2.271.000,00	2	2.271.000	0%	400.000	18%	400.000	0%	0%	0%	400.000	0%	2.671.000	-	117,61	

BADAN KESATUAN BANGSDA DAN POLITIK

BADAN KESATUAN BANGSDA DAN POLITIK

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun 2024 yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II TAHUN 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab
							I		II		III		IV					
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13=6+12	14=13/5x100%	15
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tertaksananya Koordinasi dan PenyusunanPerubah an DPA-SKPD	8.186.000	8.186.000,00	2	8.186.000	0%	-	27%	2.200.000	0%	0%	0%	2.200.000	0%	10.386.000	126,88
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.669.000	20.369.000,00	4	4.669.000	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	-	0%	20.369.000	436,26
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.800.283.492	1.812.603.565,00		1.800.283.492	0%	359.662.625	47%	841.230.667			47%	841.230.667		2.653.834.232	147,41
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan	1.793.141.492	1.806.361.565,00	12	1.793.141.492	0%	359.662.625	47%	841.230.667	0%	0%	47%	841.230.667		2.647.592.232	147,65
		Pelaksanaan penatausahaan dan penguan/verifikasi keuangan SKPD	Tertaksananya Pelaksanaan penatausahaan dan penguan/verifikasi keuangan SKPD			4			-	0%	-	0%						
		Koordinasidan pelaksanaan Akutansi SKPD	Tertaksananya Koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD			4			-	0%	-	0%	0%					
		Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya Dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran			1			-	0%	-	0%	0%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.321.000	4.321.000	1	4.321.000	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	-		4.321.000	100,00
		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Tersusunnya Dokumen tanggapan pemeriksaan			1		0%	-	0%	-	0%	0%	0%	-		-	

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Restra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Restra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun 2024 yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II TAHUN 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab
							I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/5x100%	15
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 821 000	1 921 000	16	2 821.000	0%	-	0%	0%	0%	1.921.000	68,10
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		40 889 080		40 889 080	0%	91%	37 364 535		0%	37.364.535	37.364.535	91,38
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40 889 080		62	40 889 080	0%	-	0%	0%	0%	-	-
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40 889 080		62	40 889 080	0%	-	91%	37 364 535	0%	37.364.535	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		395 637 500	419 850 000	395 637 500	0%	55 052 000	34%	132 926 200		132.926.200	552.776.200	139,72
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	1 707 000	1 707 000	2	1 707 000	0%	-	35%	605 000	0%	605.000	2.312.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.595 000	33.400 000	3	31 595 000	0%	2 098 000	7%	2 098 000	0%	2 098 000	35 498 000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	-	-	3	-	0%	2 098 000	0%	-	0%	-	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	-	-	3	-	0%	2 098 000	0%	-	0%	-	-

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Restra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Restra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun 2024 yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II TAHUN 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7	8		9		10	11		12		13=6+12		14=13/5x100%	15		
		Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan		8.732.500		10.215.000	2	8.732.500	0%	2.850.000	58%	5.075.000	0%	0%	58%	5.075.000		15.290.000		175,09		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		353.603.000		374.528.000	2	353.603.000	0%	45.908.000	35%	125.148.200	0%	0%	35%	125.148.200		499.676.200		141,31		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			513.469.322		498.346.470		513.469.322	0%	72.240.650	36%	187.145.900	0%	0%	36%	187.145.900		685.492.370		133,50		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4.000.000		4.000.000	1	4.000.000	0%	500.000	25%	1.000.000	0%	0%	25%	1.000.000		5.000.000		125,00		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumb er Daya air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik		35.500.906		33.939.190	1	35.500.906	0%	7.957.440	46%	16.309.480	0%	0%	46%	16.309.480		50.248.670		141,54		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		473.968.416		460.407.280	1	473.968.416	0%	63.783.210	36%	169.836.420	0%	0%	36%	169.836.420		630.243.700		132,97		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64.191.000		64.199.000		64.191.000	0%	12.973.000	26%	16.968.000	0%	0%	26%	16.968.000		81.167.000	####	126,45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Restra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Restra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II TAHUN 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab
							I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/5x100%	15
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.191.000	64.199.000	1 64.191.000	0%	12.973.000	26%	16.968.000	0%	16.968.000	81.167.000	126,45
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	1 -	0%	0%	-	0%	-	-	-	
	Meningkatnya Persentase Pemahaman Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		609.190.450	960.993.830	100 609.190.450	0%	48.615.500	18%	107.315.500	0%	107.315.500	1.068.309.330	175,37
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	1.464.000	1 -	0%	0%				1.464.000	-	

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Restra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Restra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Restra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun 2024 yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II TAHUN 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab
							I	II	III	IV								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13=6+12	14=13/5x100%	15
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kegiatan peningkatan pemahaman di Bidang Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pmbauran kebangsaan bhineka tunggal ika dan Sejarah Kebangsaan	609.190.450	905.658.830	5	609.190.450	0%	48.615.500	18%	107.315.500	0%	0%	0%	107.315.500	1.012.974.330	166,28	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	-	53.871.000	6	-	0%	-	0%	0%	0%	0%	-	53.871.000	-	-	
3	Peningkatan Pendidikan Politik dan Fasilitasi Kelembagaan	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		40.232.583.000	22.874.220.000	100	40.232.583.000	0%	-	0%	23.856.000	0%	0%	0%	23.856.000	22.898.076.000	56,91	BADAN KESATUAN BANGSDA DAN POLITIK

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Restra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Restra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun 2024 yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II TAHUN 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab
							I	II	III	IV								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/5x100%	15				
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta/parpol pada Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40.232.583.000	22.874.220.000	118 40 232 583 000	0%	-	0%	23 856 000	0%	0%	-	0%	23.856.000	22 898 076 000	56,91	
4	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		59.550.000	58.580.000	100 59.550.000	0%	100%	12.055.600	0%	0%	-	100%	12.055.600	70.635.600	118,62		
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kecamatan dengan Organisasi Masyarakat, OKP dan LSM yang terdaftar di Kapuas Hulu	59 550 000	58.580.000	9 59 550 000	0%	-	100%	12 055 600	0%	0%	-	100%	12.055.600	70 635 600	118,62	

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Restra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Restra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun 2024 yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada Trwulan II TAHUN 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab
							I		II		III		IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/5x100%	15				
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		29.080.500	68.689.000	100	29.080.500	0%	0%	0%	0%	-	0%	68.689.000	236,20			
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidangmg Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan di Bidangmg Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1.276.000	1	0%	0%	0%	0%	0%	1.276.000	#DIV/0!					
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidangmg Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah kegiatan peningkatan pemahaman di Bidangmg Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	29.080.500	39.540.000	3	29.080.500	0%	0%	0%	0%	39.540.000	135,97					

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Restra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Restra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun 2024 yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II TAHUN 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab	
							I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/5x100%	15	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Koordinasi Pemahaman masyarakat di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		13.373.000	2	0%	0%	0%	0%	0%	13.373.000	#DIV/0!		
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah kecamatan yang di Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		14.500.000	15	0%	0%	0%	0%	0%	14.500.000	#DIV/0!		
6	Persentase Pemahaman Masyarakat di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		153.046.500	263.915.000	100	153.046.500	0%	0%	81.000.000	0%	0%	81.000.000	344.915.000	225,37

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Restra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Restra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun 2024 yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II TAHUN 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab
							I		II		III		IV					
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12	13=6+12	14=13/5x100%	15	
		Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 060 500	61 319 000	3	30 060 500	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	-	61 319 000	203,99	
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Unsur Pimpinan Daerah	122 986 000	202 596 000	12	122 986 000	0%	0%	81 000 000	0%	0%	-	0%	81 000 000	283 596 000	230,59	

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

Faktor pendorong keberhasilan kinerja
Faktor penghambat pencapaian kerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya

Disusun

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU



MUHTARUDDIN, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP.199710279 199101 1 003

Dievaluasi

Putussibau, Juli 2024
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KAPUAS HULU

AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19730102 199803 1 008

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, pada dasarnya kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu, Sejalan dengan itu, misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang ditetapkan dalam tujuan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun 5 Tahun kedepan adalah **MISI PERTAMA : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KAPUAS HULU YANG HARMONIS DALAM KERUKUNAN KEHIDUPAN BERAGAMA, BUDAYA DAN KEAMANAN.** Tujuan 1 : **Mewujudkan Masyarakat Yang Aman, Religius dan Budaya, Sasaran Ke-2 : yaitu Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama.** Dengan ditetapkannya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Program dan Kegiatan yang dirancang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 terdiri dari 6 (Enam) Program dan 11 (Sebelas) kegiatan dengan jumlah Pagu Indikatif sebesar Rp. 43.925.289.344,- (*Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), namun dengan adanya perubahan anggaran maka pagu indikatif program dan kegiatan perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 44.163.471.407,- (*Empat Puluh Empat Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah*). Rekapitulasi Program, Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

FORM MATRIK RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN BESERTA PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2024				Catatan Penting	SESUDAH PERUBAHAN TAHUN 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp. 43.925.289.344	DAU			Rp. 44.163.471.407
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				Rp. 43.925.289.344	DAU			Rp. 44.163.471.407
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Predikat SAKIP	BADAN KESBANGPOL	B	Rp. 2.841.838.894	DAU		B	Rp. 2.633.421.097
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	BADAN KESBANGPOL	100%	Rp. 27.368.500	DAU		100%	Rp. 27.368.500
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun	BADAN KESBANGPOL	2 Dokumen	Rp9.893.500	DAU		2 Dokumen	Rp9.893.500
8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	BADAN KESBANGPOL	1 Dokumen	Rp2.349.000	DAU		1 Dokumen	Rp2.349.000
8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	BADAN KESBANGPOL	1 Dokumen	Rp2.271.000	DAU		1 Dokumen	Rp2.271.000
8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	BADAN KESBANGPOL	1 Dokumen	Rp8.186.000	DAU		1 Dokumen	Rp8.186.000
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BADAN KESBANGPOL	4 Dokumen	Rp. 4.669.000	DAU		4 Dokumen	Rp. 4.669.000
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan berlaku	BADAN KESBANGPOL	100%	Rp1.800.283.492	DAU		100%	Rp. 1.591.865.555

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	BADAN KESBANGPOL	12 Bulan orang/bulan	Rp1.793.141.492	DAU		12 Bulan/orang/bulan	Rp. 1.584.723.555
8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BADAN KESBANGPOL	1 Laporan	Rp4.321.000	DAU		1 Laporan	Rp. 4.321.000
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	BADAN KESBANGPOL	1 Laporan	Rp2.821.000	DAU		1 Laporan	Rp2.821.000
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	BADAN KESBANGPOL	100%	Rp40.889.080	DAU		100%	Rp40.889.080
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	BADAN KESBANGPOL	62 Paket	Rp40.889.080	DAU		62 Paket	Rp. 37.364.535
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	BADAN KESBANGPOL	100%	Rp. 395.637.500	DAU		100%	Rp. 390.348.700
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	BADAN KESBANGPOL	12 Paket	Rp. 1.707.000	DAU		12 Paket	Rp. 1.707.000
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	BADAN KESBANGPOL	12 Paket	Rp. 31.595.000	DAU		12 Paket	Rp. 25.786.200
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	BADAN KESBANGPOL	12 Paket	0	DAU		12 Paket	Rp. 810.000
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	BADAN KESBANGPOL	12 Paket	0	DAU		12 Paket	Rp. 40.940.000
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan penggunaan	BADAN KESBANGPOL	12 Paket	Rp. 8.732.500	DAU		12 Paket	Rp. 8.911.500
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BADAN KESBANGPOL	2 Laporan	Rp. 353.603.000	DAU		2 Laporan	Rp. 312.194.000
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	BADAN KESBANGPOL	12 Bulan	Rp. 513.469.322	DAU		12 Bulan	Rp. 515.782.807

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	BADAN KESBANGPOL	1 Laporan	Rp. 4.000.000	DAU		1 Laporan	Rp. 4.000.000
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	BADAN KESBANGPOL	1 Laporan	Rp. 35.500.906	DAU		1 Laporan	Rp. 35.494.391
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	BADAN KESBANGPOL	1 Laporan	Rp. 473.968.416	DAU		1 Laporan	Rp. 476.288.416
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	BADAN KESBANGPOL	1 unit	Rp. 64.191.000	DAU		1 unit	Rp. 67.191.000
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	BADAN KESBANGPOL	1 Unit	Rp. 64.191.000	DAU		1 Unit	Rp. 67.191.000
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	BADAN KESBANGPOL	100%	Rp. 609.190.450	DAU		100%	Rp. 712.890.310
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan, Pelaksan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaanaan	BADAN KESBANGPOL	100%	Rp. 609.190.450	DAU		100%	Rp. 712.890.310
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kegiatan pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	BADAN KESBANGPOL	5 Kegiatan	609.190.450	DAU		6 Kegiatan	712.990.310
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN								

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

8	01	03	2.01		PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		BADAN KESBANGPOL						
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Berdemokrasi	BADAN KESBANGPOL	83%	Rp 40.232.583.000	DAU		83%	Rp40.464.733.000
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		BADAN KESBANGPOL						
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas Yang Terdaftar	BADAN KESBANGPOL	20%	Rp 59.550.000	DAU		20%	Rp 59.550.000
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Pemahaman Masyarakat di Bidang Pengembangan	BADAN KESBANGPOL	100%	29.080.500	DAU		100%	79.080.500

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

					KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.							
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	BADAN KESBANGPOL	100%	29.080.500	DAU		100%	79.080.500
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	BADAN KESBANGPOL	1 Kegiatan	29.080.500	DAU		2 Kegiatan	79.080.500
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pemahaman Masyarakat di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah	BADAN KESBANGPOL	100%	153.046.500	DAU		100%	213.796.500
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	BADAN KESBANGPOL	100%	153.046.500	DAU		100%	213.796.500
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	BADAN KESBANGPOL	1 Kegiatan	30.060.500	DAU		1 Kegiatan	30.060.500

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	BADAN KESBANGPOL	1 Kegiatan	122.986.000	DAU		1 Kegiatan	183.736.000
---	----	----	------	------	---	--	------------------	------------	-------------	-----	--	------------	-------------

BAB IV

PENUTUP

Perencanaan dan Penganggaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka Upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah khususnya dalam Perencanaan dan Penganggaran disusun dan dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai tujuan sesuai sasaran yang telah disepakati bersama

Oleh karena itu, diharapkan dukungan anggaran yang sesuai dengan usulan yang tertuang dalam naskah ini agar program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan secara optimal dan dapat mencapai sasaran. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini sangat tergantung pada tekad, semangat dan keinginan untuk maju dengan dukungan sikap mental yang kuat dan disiplin dari semua pihak yang baik yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Pembangunan daerah.

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini, semua kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan akan mengacu pada Renja yang telah disepakati Bersama, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi secara optimal.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini tentunya sangat dipengaruhi oleh peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta dukungan semua pihak terkait, sehingga sangat diperlukan Upaya Langkah-langkah koordinasi dan konsultasi melalui pendekatan secara formal maupun nonformal.

Putussibau, Juli 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU



MUHTARUDIN, S.Sos, M.A.P
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19710219 199101 1 003